

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYA

Agus Wahid*, Budiman Rusli, Ani Heryani, Deni Sudrajat

STIA YPPT Priatim Tasikmalaya

e-mail co Author: *wahidagus738@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bojongasih, Kabupaten Tasikmalaya, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan peraturan yang ada, PKH bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin melalui akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Namun, hasil observasi awal menunjukkan bahwa implementasi PKH belum mencapai tujuan yang diharapkan, dengan beberapa fenomena yang masih menghambat efektivitas program. Dalam penelitian ini, fokus diberikan pada pemahaman tentang faktor pendukung dan penghambat implementasi PKH di Kecamatan Bojongasih. Melalui analisis terhadap data kualitatif yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan analisis dokumen, penelitian ini mengeksplorasi faktor-faktor terhadap implementasi PKH di Kecamatan Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktif dan partisipasi dari berbagai pihak, koordinasi yang baik, evaluasi berkala, dan peningkatan kapasitas pendamping PKH merupakan faktor penting dalam menjaga efektivitas program. Namun, masih terdapat beberapa tantangan, seperti kurangnya keterlibatan masyarakat, kriteria seleksi yang tidak sesuai, kurangnya dampak positif yang dirasakan oleh penerima manfaat, dan kelemahan dalam pengambilan keputusan terkait program. Kesimpulannya, kolaborasi lintas sektor, koordinasi yang baik, evaluasi berkala, peningkatan kapasitas pendamping, dan umpan balik dari penerima manfaat menjadi elemen penting dalam memastikan keberhasilan PKH.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, Program Keluarga Harapan.

PENDAHULUAN

Pembangunan sosial masyarakat di Indonesia saat ini melibatkan berbagai aspek, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, budaya, dan lainnya. Pemerintah fokus pada perubahan sosial, pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan, dan pemberdayaan masyarakat. Di bidang pendidikan, program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM) dirancang untuk mendukung akses pendidikan bagi keluarga dengan tingkat ekonomi rendah. Pembangunan ekonomi didorong melalui program Nawacita dan Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan investasi dan daya saing. Infrastruktur diperkuat melalui proyek seperti Pembangunan Infrastruktur Prioritas Nasional (Pipnas).

Program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah telah memprioritaskan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan dukungan pada usaha kecil dan menengah. Di bidang kesehatan, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diperkenalkan untuk meningkatkan akses pelayanan. Namun, tantangan masih ada dalam meningkatkan aksesibilitas layanan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat, sehingga pemerintah menerbitkan peraturan terkait program perlindungan sosial, seperti Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH.

PKH memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin di Indonesia dengan tujuan mengatasi kemiskinan kronis dengan memberikan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan. Program ini juga menjangkau penyandang disabilitas dan lanjut usia. Namun, implementasinya menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya kesadaran dan informasi masyarakat serta kebutuhan akan pemantauan dan evaluasi yang lebih efektif. Di Kecamatan Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya, PKH masih belum sepenuhnya mencapai tujuan kebijakan. Keterlibatan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kurang, manfaat program belum mencapai sasaran, dan keputusan terkait penerima manfaat masih lemah. Pengembangan strategi pemantauan dan evaluasi yang lebih efektif diperlukan untuk memperbaiki pelaksanaan PKH.

Istilah kebijakan dikemukakan Anderson (Kusnandar, 2012) bahwa: "Kebijakan adalah serangkaian langkah yang memiliki keinginan tersendiri yang diikuti dan dilaksanakan oleh penyelenggara guna memecahkan suatu problem dalam masalah tertentu". Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa kebijakan sebagai serangkaian langkah yang disusun dengan tujuan khusus, yang kemudian dijalankan oleh pihak yang bertanggung jawab, untuk mengatasi masalah atau menangani situasi tertentu. Kebijakan ini mencerminkan keinginan atau niat dari para penyelenggara dalam mencari solusi terhadap suatu permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, kebijakan menjadi pedoman atau arahan bagi tindakan yang akan diambil guna mencapai hasil yang diinginkan dalam rangka memecahkan masalah yang ada.

Kleijn (Hoogerwerf, 1992) menyatakan: "Kebijakan adalah secara sadar dan sistematis, menggunakan cara-cara yang tepat, dengan tujuan politik yang jelas sebagai tujuan dan berjalan secara bertahap". Dari pernyataan tersebut bahwa kebijakan merujuk pada serangkaian langkah yang diambil secara sadar dan sistematis oleh pemerintah atau organisasi lainnya. Hal ini dilakukan dengan menggunakan metode yang tepat dan terencana, dengan tujuan politik yang jelas sebagai panduan utama. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap langkah yang diambil memiliki alasan yang kuat dan sesuai dengan tujuan politik yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sementara istilah kebijakan publik menurut Easton (Islamy, 2004) menyatakan: "Kebijakan publik adalah mendistribusikan nilai kekuasaan untuk semua masyarakat yang mengikat". Dalam sebuah negara demokratis, kebijakan publik

harus mencerminkan kepentingan dan nilai-nilai dari seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir orang atau kelompok yang berkuasa. Setiap kebijakan perlu diimplementasikan karena tujuan dari kebijakan tersebut yaitu untuk memberikan solusi atau mengatasi suatu permasalahan yang ada dalam masyarakat. Tanpa dilaksanakannya kebijakan tersebut, tujuan tersebut tidak akan tercapai dan masalah yang ingin dipecahkan pun akan tetap berlanjut atau bahkan bisa memburuk, sehingga kebijakan yang tidak dapat dilaksanakan hanya akan menjadi wacana kosong tanpa dampak nyata bagi masyarakat.

Implementasi kebijakan yang efektif juga merupakan indikator keberhasilan pemerintahan dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya terhadap warga negara. Sehingga, kebijakan yang dibuat haruslah realistis, sesuai dengan kapasitas serta sumber daya yang tersedia, serta mempertimbangkan berbagai faktor yang mungkin mempengaruhi pelaksanaannya. Kebijakan membantu dalam mengatur perilaku individu, kelompok, atau institusi agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah adalah alat utama dalam upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Implementasi kebijakan merupakan tahap pelaksanaan dari desain kebijakan yang telah dirumuskan (*policy formulation*) (Rusli, 2015). Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses krusial dalam siklus kebijakan publik di mana kebijakan yang telah dirumuskan di tahap perencanaan dan desain harus dijalankan. Pada tahap ini, rencana dan strategi yang telah dibuat harus diterjemahkan menjadi tindakan konkret dan program-program yang dapat dijalankan oleh instansi atau lembaga terkait.

Menurut Grindle (Rusli, 2015) terdapat dua kelompok utama yang mempengaruhi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu variabel isi kebijakan (*content of policy*) dan variabel konteks kebijakan (*context of policy*). Kedua kelompok variabel tersebut saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Konteks yang tepat dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan dengan memfasilitasi penerapan isi kebijakan secara efektif, sementara isi kebijakan yang baik juga dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam konteks tertentu. Dengan memahami dan memperhatikan kedua aspek ini secara holistik, pembuat kebijakan dapat meningkatkan peluang keberhasilan implementasi kebijakan dimaksud.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta PKH di Desa Kluwut mayoritas berusia antara 31 hingga 40 tahun, dengan sebagian besar memiliki pendidikan setara SD/MI. Implementasi PKH di Desa Kluwut dinilai berhasil mengikuti pedoman yang ditetapkan serta mampu meningkatkan kualitas hidup peserta melalui akses layanan pendidikan dan kesehatan. Namun demikian, penelitian juga mengungkapkan adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan PKH yang memerlukan solusi untuk diatasi secara efektif (Agnes, 2019).

Pelaksanaan kebijakan terkait PKH telah membantu masyarakat dari masalah kemiskinan, namun demikian masih meninggalkan permasalahan di lapangan. Hasil

penelitian selanjutnya menunjukkan dalam implementasi program PKH di Kabupaten Probolinggo memberikan kontribusi positif terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat, meskipun masih terdapat beberapa kendala, seperti ketidaksesuaian data dan kurangnya efektivitas sosialisasi, sehingga disarankan perlu adanya upaya untuk mereduksi faktor penghambat tersebut guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas program PKH di masa mendatang (Aldiastri, 2016).

Analisis implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya merupakan sebuah langkah penting dalam memahami efektivitas dan dampak program tersebut terhadap masyarakat. PKH merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dengan memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin dan rentan. Analisis ini dapat membantu dalam evaluasi keberhasilan program dalam mencapai tujuan tersebut. Dengan melakukan analisis, dapat diidentifikasi sejauh mana program PKH telah memberikan manfaat kepada penerima manfaatnya, baik dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan maupun peningkatan kesejahteraan ekonomi. Selain itu, analisis juga dapat mengungkapkan kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi program, seperti birokrasi, distribusi bantuan yang tidak merata, atau permasalahan sosial yang mempengaruhi efektivitas program

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya. Informan penelitian merupakan individu yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di wilayah tersebut. Data dikumpulkan melalui dua teknik utama, yakni studi kepustakaan untuk mendapatkan pemahaman teoritis yang mendalam, serta studi lapangan yang meliputi observasi langsung dan wawancara dengan para informan.

Setelah data terkumpul, analisis dilakukan melalui beberapa tahap, termasuk reduksi data untuk menyederhanakan informasi yang terkumpul, display data untuk menampilkan temuan secara visual, verifikasi untuk memastikan keabsahan data, dan terakhir penarikan kesimpulan untuk menggambarkan temuan utama dari penelitian ini. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi Program Keluarga Harapan di wilayah tersebut serta potensi perbaikan yang dapat dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bojongasih, Kabupaten Tasikmalaya, menghadapi sejumlah kekuatan, dukungan, hambatan, dan tantangan yang terkait dengan faktor-faktor yang beragam. Pertama, dari segi pihak kepentingan yang dipengaruhi, jumlah dan jenis kelompok masyarakat yang terlibat atau terpengaruh dapat memengaruhi efektivitas program. Tingkat partisipasi dan keterlibatan pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah, lembaga sosial, dan

masyarakat menjadi kunci dalam mendukung implementasi PKH. Keberhasilan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) membutuhkan kerjasama dari semua pemangku kepentingan atau *stakeholders* karena program ini melibatkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga. Pemerintah sebagai penyelenggara program memiliki peran utama dalam mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PKH secara efektif.

Dalam hal jenis manfaat yang dapat diperoleh, jenis manfaat yang diperoleh oleh keluarga penerima manfaat berperan penting dalam menilai keberhasilan program. Sementara itu, tingkat keberlanjutan manfaat yang diperoleh juga menjadi fokus utama, di mana upaya untuk memastikan kelangsungan manfaat jangka panjang perlu diperhatikan. Dari segi jangkauan perubahan yang diharapkan, evaluasi terhadap perubahan yang diharapkan menjadi aspek penting. Hal ini termasuk dalam penilaian terhadap perubahan perilaku dan peningkatan kapasitas keluarga penerima manfaat. Proses evaluasi yang komprehensif dapat membantu mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki serta memperkuat aspek-aspek positif yang sudah ada.

Tantangan dalam pelaksanaan PKH di Kecamatan Bojongasih mencakup beragam masalah, mulai dari ketersediaan sumber daya hingga pemahaman masyarakat terhadap program. Diperlukan koordinasi yang kuat antara berbagai pihak terkait dan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program. Selain itu, pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus menjadi kunci dalam memastikan bahwa program ini efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, mengatasi hambatan-hambatan ini sambil memperkuat dukungan dan kekuatan yang ada dapat membantu meningkatkan efektivitas dan dampak positif dari Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bojongasih, Kabupaten Tasikmalaya.

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bojongasih, Kabupaten Tasikmalaya, memiliki kekuatan, dukungan, hambatan, dan tantangan yang berasal dari beberapa faktor kunci. Pertama, dalam aspek pelaksanaan pengambilan keputusan, kekuatan terletak pada proses yang telah dirancang untuk memastikan keputusan yang efektif dan efisien. Namun, dukungan dari pihak terkait dalam pengambilan keputusan mungkin bervariasi, mempengaruhi keseluruhan proses. Keterlibatan yang kuat dari berbagai pihak terkait dapat memperkuat pelaksanaan program, sementara kurangnya keterlibatan dapat menjadi hambatan signifikan.

Kedua, pelaksana program memainkan peran penting dalam keberhasilan PKH. Penilaian terhadap kemampuannya untuk melaksanakan program dengan baik serta evaluasi kualitas pelaksanaan program secara berkala menjadi kunci dalam memastikan efektivitasnya. Tantangan dapat muncul jika kemampuan pelaksana program tidak memadai atau jika kualitas pelaksanaan program tidak terjaga dengan baik. Ketiga, sumber daya yang tersedia menjadi faktor penentu dalam pelaksanaan PKH. Ketersediaan sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur mempengaruhi kecukupan untuk mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan.

Mengelola Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bojongasih, sering kali dihadapkan pada tantangan ketika sumber daya yang dimiliki tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan program secara optimal. Hal ini menghambat kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan, sehingga memandang penting untuk mengelola proses pengambilan keputusan dengan bijaksana, menilai dan mengevaluasi kualitas pelaksanaan program secara berkala, serta memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai guna mencapai tujuan program dengan efektif.

Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya menghadapi dinamika yang kompleks terkait dengan kekuatan, dukungan, hambatan, dan tantangan dari faktor-faktor yang berbeda. Dalam konteks kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat, pembagian tugas pelaksanaan program menjadi krusial karena mempengaruhi efisiensi dan efektivitas program. Konsistensi dalam pelaksanaan program juga penting untuk menjaga kelangsungan dan kepercayaan masyarakat. Namun, tantangan muncul ketika kepentingan individu atau kelompok menghalangi tujuan keseluruhan program.

Dari aspek ciri kelembagaan dan rezim, dukungan dan keterlibatan institusi terkait merupakan faktor penentu keberhasilan PKH. Transparansi dalam pelaksanaan program juga diperlukan untuk membangun kepercayaan publik dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Namun, terkadang, kurangnya transparansi bisa menjadi hambatan yang menghambat akuntabilitas program. Kepatuhan dan daya tanggap dari pihak-pihak yang terlibat sangat menentukan keberhasilan PKH. Tingkat kepatuhan terhadap kebijakan yang ditetapkan dan responsibilitas dalam menjalankan program sesuai dengan arahan dan peraturan adalah faktor kunci. Namun, tantangan timbul jika ada resistensi atau kurangnya kesadaran akan pentingnya kepatuhan dan responsibilitas dalam menjalankan program. Oleh karena itu, untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan PKH, penting untuk terus mengelola dinamika dan memperkuat kolaborasi antara semua pihak terlibat.

Berdasarkan beberapa bahasan yang telah dikemukakan dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam mengimplementasikan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bojongasih, Kabupaten Tasikmalaya, perhatian terhadap berbagai faktor sangatlah penting. Pertama, pihak kepentingan yang terpengaruh seperti jumlah dan jenis kelompok masyarakat serta tingkat partisipasinya memengaruhi efektivitas program. Kedua, jenis manfaat yang diperoleh oleh keluarga penerima manfaat dan tingkat keberlanjutan manfaat juga menjadi perhatian penting. Ketiga, evaluasi terhadap perubahan yang diharapkan dan perubahan perilaku serta peningkatan kapasitas keluarga penerima manfaat harus terus dipantau.

Keempat, pelaksanaan pengambilan keputusan dan keterlibatan pihak terkait dalam proses tersebut sangat menentukan. Kelima, penilaian terhadap kemampuan pelaksana program dan evaluasi kualitas pelaksanaan program mendukung kesuksesan implementasi. Keenam, sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur, harus memadai untuk mencapai tujuan dan target yang ditetapkan. Selanjutnya, kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor

yang terlibat, termasuk pembagian tugas dan konsistensi pelaksanaan, perlu diperhatikan. Ketujuh, ciri kelembagaan dan rezim, termasuk dukungan dan keterlibatan institusi terkait serta transparansi, turut memengaruhi keberhasilan program. Terakhir, tingkat kepatuhan dan responsibilitas dari pihak yang terlibat dalam menjalankan program sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan menjadi aspek penting dalam memastikan keberhasilan PKH di wilayah tersebut. Dengan memperhatikan semua faktor ini, implementasi PKH di Kecamatan Bojongasih dapat berjalan dengan lebih efektif.

KESIMPULAN

Kesimpulannya, kolaborasi lintas sektor, koordinasi yang baik, evaluasi berkala, peningkatan kapasitas pendamping, dan umpan balik dari penerima manfaat menjadi elemen penting dalam memastikan keberhasilan PKH. Saran dari penelitian ini mencakup perlunya meningkatkan keterlibatan semua pihak terkait, evaluasi yang cermat, peningkatan koordinasi, peningkatan kapasitas pendamping PKH, dan memperhatikan umpan balik dari penerima manfaat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program ini di masa mendatang. Sinergi antara sumber daya manusia, keuangan, infrastruktur, dan harapan para penerima manfaat menjadi landasan kuat dalam memastikan kesuksesan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bojongasih, Kabupaten Tasikmalaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes Pradina S. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.
- Aldiastri Damayanti Dwi Andrini. (2016). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat (Studi Kasus Di Kabupaten Probolinggo). Program Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
- Hoogerwerf. (1992). *Ilmu Pemerintahan* (Tobing (ed.)). Erlangga.
- Islamy, I. (2004). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Sinar Grafika.
- Kusnandar, I. (2012). *Analisis Kebijakan Publik*. Multazam.
- Rusli, B. (2015). *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Hakim Publishing.